MELACAK AKAR RASIALISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Abdul Muntholib
Jurusan Sejarah FIS Unnes

Abstract

Chinese immigrant had settled in Indonesia long before the Europeans arrived, and quite significant Chinese communities, engaged in commerce and mining enterprise, already existed before the 19^{th} century. The most important factor was the region's phenomenal economic development which offered opportunities that were far more promising than in China. Chinese in Indonesia was minority; nevertheless they were mostly occupied in trade. This term, however, includes both commerce and industry, and covers everything from peddlers to big businessmen. Contractual relations are increasing at the expense of trust relations; extreme individualistic competition, frugality, perseverance and the willingness to work long and hard are less emphasized than formerly, at least among the Peranakans. Historical evidence shows that mostly, Chinese businessmen build a good relationship with the state directly or indirectly, and if the current circumstance of Chinese prejudice arouse among the state, it could be the guidance to the depth of ruin.

Key words : Racialism, histories perspectives, ethnicity

PENDAHULUAN

Kerusuhan massal yang disertai unsur kekerasan dan pengrusakan, memang bukan fenomena baru dalam masyarakat Indonesia. Berbagai kajian sejarah telah menunjukkan dengan jelas berbagai protes petani pada akhir abad ke-19. Revolusi Kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950 juga sangat diwarnai oleh bentuk kekerasan massa di berbagai penjuru Indonesia.

Kerusuhan serta penjarahan yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari budaya bangsa. Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa ini tidak bisa lepas dari kekerasan, setiap kali pergantian kekuasaan selalu saja dihiasi pertumpahan darah. Perebutan kekuasaan selalu terjadi pada kerajaan-kerajaan di Jawa, baik Mataram, Demak atau Majapahit. Juga pergantian kekuasaan di masa kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, bahkan akhir-akhir ini sering dijumpai aksi-aksi kerusuhan massa yang berbasis rasialis, dan yang cukup tinggi intensitasnya adalah kekerasan rasial pada tanggal 13-14 Mei 1998 yang baru lalu, ada yang menduga bahwa kekerasan itu diwujudkan dalam prosedur dan system dalam artian dikomando.

Tulisan kali ini berusaha mengupas masalah rasialis dan setimen anti Cina yang terus mewarnai interaksi sosial ekonomi politik dan budaya di Indonesia. Telah waktunya kita membicarakan masalah ini secara terbuka.

PERSPEKTIF HISTORIS

Hampir semua Negara Asia Tenggara – termasuk Indonesia menghadapi masalah hubungan pri dan nonpri. Letak Cina yang secara geograifs lebih dekat ke wilayah Asia Tenggara menyebabkan imigrasi penduduk Cina ratusan tahun lalu paling besar di wilayah ini. Dengan perahu mereka menuju negari baru dan melepaskan diri dari kesulitan hidup di negaranya.

Kaum pendatang itu ternyata memegang peranan ekonomi yang kuat sejak Negara-negara yang mereka datangi masih dijajah. Sementara itu, kebijakan ekonomi politik colonial membuat penduduk asli lebih lemah secara ekonomi, fakta ini terus berlangsung setelah penjajahan usai. Karena itulah kebencian umum kepad etnis Cina sering didasari oleh sentiment ekonomi.

Pada dasarnya, kerusuhan anti Cina yang melanda hampir semua Negara Asia Tenggra adalah manifestasi ketidak senangan pada orang-orang Cina akibat persaingan ekonomi yang tidak setara. Seringkali mereka memanipulasi kebencian tersebut dalam bentuk tekanan politik, tindak kekerasan atau diskriminasi yang dikemas dalam bentuk nasionalisme ekonomi atau program pribumisasi.

Kalau ada kesamaan, ada juga perbedaan signifikan mengenai kerentanan hubungan etnis Cina dengan pribumi secara intensitas diskriminasi di masing-masing Negara itu. Perbedaan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio politik dan latar belakang sejarah yang berbeda. Di Thailand dan Filipina hubungan penduduk asli dengan etnis Cina lebih serasi, padahal jumlah etnis Cina di Thailand jauh lebih besar sekitar 10 persen.

Penjelasannya tidak hanya cukup dengan pendekatan structural tetapi juga cultural. Mereka telah terintegrasi melalui ratusan tahun, antara lain lewat proses kawin campur dengan para elite wanita local dan memeluk agama local sehingga mendorong terjadinya asimilasi alamiah. Hasilnya walau mereka mendominasi ekonomi tetapi peranan ekonomi mereka itu dianggap sebagai asset nasional dan tanpa prasangka rasial.

Di Indonesia pun sebenarnya terjadi proses kawin campur ketika gelombang imigran pertama tiba tanpa istri atau keluarga, sehingga tercipta kelompok yang namanya kaum peranakan. Tetapi gelombang kedua yang datang sekitar tahun 1870-an sampai awal abad ke-20 kebanyakan membawa keluarga, sehingga proses tersebut terlambat. Hal ini menjadi salah satu factor yang dapat menjelaskan mengapa intensitas ketidak senangan pada etnis Cina di Indonesia lebih hebat dibandingkan Negara Asia Tenggara lainnya (Valina Singka Subektia 1998: 5).

Di samping itu, masalah minoritas pri dan nonpri sebetulnya berakar dari zaman colonial Belanda. Orang-orang keturunan Cina yang tinggal di sini pada masa itu sudah mendapat perlakukan yang rasialis.

Kerusuhan anti Cina pertama meletus pada 1740 di Batavia. Pelakunya adalah penduduk Belanda (Eropa). Sejak peristiwa itu, lahirlah peraturan-peraturan pemindahan rasial dan agama. Orang Cina harus tinggal di kampung-kampung Cina, dan untuk mengadakan perjalanan di luar kampung masing-masing atau antar kampung orang Cina harus membawa "pas-pasan".

Sistem yang dikenal sebagai *Wijken* dan *passen stelsel* (sistem pas dan pemukiman) ini membatasi kebebasan bergerak secara fisik penduduk Cina. Dengan adanya politik tanam paksa (1830-1837) orang Belanda menjalankan sistem ini dengan ketat guna mempertahankan monopoli ekonominya.

Kebijakan rasialis yang makin tegas juga muncul sejak permulaan abad ke-19. Pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduk menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing (Cina, Arab dan lain-lain) dan pribumi. Kebijaksanaan colonial membagi kelas penduduk dan kebijaksanaan pembatasan gerak fisik inilah yang menjadi embrio politik *apartheid* yang berlaku di Afrika Selatan.

Para pejabat colonial Belanda juga sangat terkenal karena sentimen-sentimen anti Cina mereka seperti ditulis oleh Victor Purcell (Ong Hokham, 1998: 24). Salah satunya adalah Baud, seorang menteri Kolonial Belanda (1800) yang terkenal sebagai anti Hindia Cina biarpun sebenarnya dia adalah seorang pengacara di Batavia yang menjadi kaya karena banyak menangani perkara-perkara orang Cina. Sentimen anti Cina memuncak sekitar *etische Politik* (1900). Sebabnya adalah keinginan untuk melindungi pribumi dari keserakahan dan kelicinan pedagang Cina. Di mata pejabat Belanda yang gandrung pada politik etis, pada masa itu kaum pribumi dianggap "Naif seperti anak kecil".

Sentimen-sentimen anti Cina dari para pejabat dan elite lain Indonesia sekarang ini mungkin juga berasal dari sentiment anti Cina pejabat colonial Belanda. Sebab, banyak aspek Negara pasca colonial itu sebenarnya adalah kolonial atau berasal darinya.

Di balik itu kebijakan kependudukan colonial Belanda yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan rasial: Eropa, Timur Asing (Cina, Arab dan lain-lain) dan pribumi – yang disertai pemisahan pola pemukiman antara pribumi dan orang Cina. Kebijakan ini memperkecil peluang interaksi sosial dan badaniah kehidupan sehari-hari, keadaan ini diperparah oleh agama mereka yang berbeda.

Sekalipun diperlakukan secara rasialis, golongan Cina menjadi makmur di bawah kekuasaan colonial. Salah satu sebab kemakmuran ini adalah karena system hukum orang Cina, dari permulaan VOC sampai akhir zaman Hindia Belanda dan sedikit banyak sampai kini adalah subjek hukum dagang dan sipil Belanda. Artinya dari permulaan hak-hak milik mereka dijamin menurut hukum Barat. Sedangkan sampai akhir masa colonial orang pribumi adalah subjek hukum adat yang praktirs tidak memiliki hukum milik pribadi.

Kekayaan swasta Cina yang diperoleh dan kemitraan dagang Belanda jauh lebih langgeng Karena dilindungi secara hukum. Sedangkan kekayaan pribumi karena kekuasaan politik ternyata tidak demikian langgeng, Karena kekuasaan politik di Indonesia ternyata sejak abad-abad lebih guncang daripada harga pasar.

Dalam abad ke-20 seluruh hukum sipil Barat termasuk hukum keluarga dan warisan dinyatakan berlaku bagi golongan Cina. Perlindungan hukum Barat ini, menurut hematnya adalah hal mutlak yang bisa menjelaskan kemakmuran sebagian penduduk Cina. Buktinya adalah orang Cina perantauan yang hidup di koloni-koloni Barat atau bekas koloni Barat yang menikmati sukses dalam ekonomi, bukan penduduk Cina daratan. Orang Cina-Hongkong, Cina-Singapura, Cina-Indonesia, Cina-Malaysia, dan sebagainya sukses dalam perekonomian.

Selain perlindungan hukum, kemakmuran orang Cina di Hindia Belanda juga muncul lantaran posisinya sebagai mitra dagang Belanda. Keadaan ini yang masih menonjol di Negara kita sekarang. Hanya pada zaman colonial tidak ada pembunuhan dan penjarahan terhadap Cina kecuali satu kali saja yakni pada tahun 1740.

Salah satu sumber kekayaan orang Cina adalah dijualnya hak pemungutan pajak-pajak Pemerintahan Belanda, misalnya atas penjualan candu, izin pegadaian, dan sebagainya, kepada mereka (patch system). Dengan dalil melindungi pribumi, baru pada 1905 monopli-monopoli tersebut diambil alih lagi oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Dengan demikian, Pemerintah Hindia Belanda merampas salah satu sumber penghasilan terbesar milik orang Cina dan juga memperketat kebebasan bergerak pada Cina. Reaksipun muncul dalam bentuk gerakan yang menuntut emansipasi atau persamaan hak dengan orang Belanda (Eropa) bagi orang Cina di Hindia Belanda. Gerakan Cina ini adalah gerakan politik-sosial pertama di Hindia Belanda, namun sifatnya sangat eksklusif. Gerakan ini hanya terdiri dari Cina dan demi orang Cina di Hindia Belanda. Sejak itu sifat *apartheid* mewarnai hal semua gerakan dan perkumpulan apa pun di HIndia Belanda.

Di sekitar 1910 kebanyakan tuntutan Cina dipenuhi. *Wijken* dan *passes stelsel* yang membatasi gerak fisik orang Cina dihapuskan. Artinya, tidak ada lagi keharusan untuk tinggal di perkampungan Cina. Orang Cina dinyatakan sebagai kawula Hindia Belanda atau Ratu Belanda dan hukum sipil Belanda diberlakukan pada orang Cina termasuk hukum keluarga Barat dengan peraturan warisan, perkawinan dan sebagainya. Hanya di bidang hukum pidana orang Cina tetap disamakan dengan golongan pribumi dan bukan dengan Eropa.

Dihapuskannya system perkampungan Cina dan pas jalan menyebabkan modal Cina mengalir keluar dari *ghetto-ghetto* mereka. Persaingan dengan bisnis pribumi serta borjuisasi Jawa pun makin marak. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya Sarekat Dagang Islam yang dengan dalil Islam ingin menyadarkan orang Islam akan persaingan ini.

Gerakan pribumi ini belakangan menjadi Sarekat Islam, yang merupakan gerakan politik massa pertama di Indonesia. Pada 1918 terjadi konflik rasial pertama antara Cina dan Jawa di kota Kudus, pusat borjuis Jawa dan Islam. Sebab langsungnya adalah sebuah prosesi keagamaan Cina yakni prosesi dari kelenteng setempat yang menyinggung perasaan orang Islam. Latar belakang yang lebih dalam tentunya persaingan antara kedua borjuasi (Ong Hok Ham, 1998: 25).

Maka dapat dikatakan, dalam sejarah colonial di Indonesia, perbedaan antar etnis ini diberi unsur perbedaan kekuatan ekonomi oleh pihak Belanda melalui pembagian kerja dalam bidang perdagangan yang dibuat berdasarkan kelompok etnis dan ras. Para sarjana ilmu sosial menyebutnya sebagai *the ethnically stratified division of labor in trade.* Dalam arti itu, perdagangan internasional dalam zaman Belanda dipegang oleh ras eropa, perdagangan antar pulau dipegang oleh kelompok-kelompok etnis yang disebut Timur Asing (foreign orientals/vreemde oosterlingen) yaitu kelompok Arab, India, dan Cina, sedangkan pribumi hanya diberi jatah perdagangan kecil (petty trade).

Jelas bahwa pembagian kerja dalam perdagangan seperti tersebut di atas merupakan suatu stratifikasi kekuatan perdagangan berdasarkan factor etnis. Tujuannya adalah memberi hak istimewa kepada ras Eropa dan kemudian memecah belah kekuatan ekonomi di kalangan penduduk Hindia Belanda. Pembagian itu juga menyebabkan bahwa kelompok Timur Asing kemudikan, tanpa maunya sendiri, menjadi lebih pandai dan lebih berpengalaman dalam perdagangan karena hal itu dimungkinkan oleh politik colonial.

Saya tak tahu dengan pasti, tetapi usaha Sertifikat Islam (SI) pada awal gerakan kebangsaan misalnya untuk membina dan memajukan pedagang pribumi, mungkin dimaksudkan juga oleh para pendiri dan penggagasnya untuk menerobos pembagian kerja colonial ini yang tidak menguntungkan kelompok pribumi dalam perdagangan.

ETHNISITAS

Kedatangan orang-orang Tionghoa di Indonesia sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Mereka datang sebagai pedagang dengan membawa tradisi dan budaya leluhur mereka di Tiongkok.

Orang-orang Tionghoa (keturunan) merupakan etnis minoritas yang beragam sub etnisnya, meski sebagai kelompok minoritas orang-orang Tionghoa keturunan menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia. Selain dikenal sebagai pedagang etnis Tionghoa juga terkenal dengan sifatnya suka hidup berkelompok, berpegang teguh pada budaya dan tradisi negeri leluhur mereka dan menjauhkan diri dari pergaulan sosial (eksklusif).

Meski inkulturasi sudah terjadi dihampir semua bidang kehidupan tetapi budaya Tionghoa perantaun hampir tidak pernah kembali hal ini disebabkan faktor budaya penduduk pribumi tidak begitu besar pengaruhnya terhadap budaya mereka. Satu aspek budaya pribumi yang mampu mempengaruhi sebagian besar orang Tionghoa hanya agama Islam (Charles A. Copel, 1994: 34).

Proses asimilasi akan terjadi dengan sendirinya dikalangan Tionghoa Indonesia kalau tidak ada faktor-faktor penghambat yang orang Tionghoa sendiri secara sadar atau tidak ikut andil besar menciptakannya. Faktor penghambat yang utama adalah sifat ekslusif dan sikap superioritas orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa merasa lebih unggul baik di bidang ekonomi maupun dari segi kepandaian, keuletan dan semangat kerja, sehingga mereka lebih sering menjauhkan diri dari pergaulan dengan penduduk pribumi.

Selain itu dipihak penduduk pribumi ada keengganan untuk menerima orang-orang Tionghoa secara pribadi menjadi Indonesia sepenuhnya. Keengganan ini sering dirasionalkan dengan alasan walaupun mereka Tionghoa telah menganggap Indonesia tanah airnya tetapi orang-orang Tionghoa masih mempertahankan adat kebiasaannya.

Persaingan ekonomi antara kelompok

Tionghoa dengan pribumi merupakan sebab dari semangat anti Tionghoa di Indonesia, sedangkan yang menentang secara kuat dominasi ekonomi masyarakat Tionghoa atas pribumi adalah kaum santri. Karena itu Islam menjadi ideologi yang memungkinkan kaum pedagang kecil Indoensia melawan pedagang Tionghoa. Boleh dikatakan bahwa Tionghoa Indonesia merupakan tawanan dari situasi dan sejarah mereka sendiri. Sebagai etnis minoritas yang realtif kaya dengan melakukan perdagangan yang tidak seimbang mereka telah menimbulkan rasa antipati dari para pesaing usahawan pribumi Indonesia.

Di bidang politik sejak masa demokrasi terpimpin hingga akhir masa Orde Baru lengser kegiatan politik orang Tionghoa telah mati. Orde Baru tidak lagi dipandang tempat yang sejuk bagi orang-orang Tionghoa untuk berpolitik. Kegiatan politik bagi etnis Tionghoa di masa Orde Baru jelas mengalami kemunduruan.

KEBIJAKAN ORDE BARU

Strategi pembangunan ekonomi Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan sekali lagi membuka kesempatan luas pada kelompok nonpri berkiprah dengan maksimal dalam setiap proses pembangunan ekonomi. Beberapa kelebihan yang dimiliki mereka – seperti modal, keahlian, penguasaan teknologi, ketrampilan, pengalaman, dan jaringan – diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penanaman modal, dan peningkatan produksi. Karena itu mudah dipahami bila kemudian persamaan kepentingan antara penguasa Orde Baru dan kelompok pengusaha nonpri. Mereka dianggap asset yang berguna untuk segera mendorong pertumbuhan.

Berbagai kebijakan telah menciptakan kesempatan luas bagi nonpri untuk berkembang. Jaringan yang mereka miliki pada tingkat local, regional, maupun global, semakin mengukuhkan kekuatan ekonomi mereka. Perkembangan ekonomi nonpri terjadi secara pesat jauh meninggalkan pribumi. Disokong oleh adanya praktik kolusi pengusaha nonpri berkembang makin pesat sehingga mengundang kemarahan pribumi. Inilah yang melatari peristiwa Malari 1974 – sebuah gerakan menggugat kekuatan ekonomi nonpri, MNC, dan praktik-praktik kolusi pejabat dan para cukong Cina.

Pelbagai deregulasi yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1980-an kemudian makin memberi peluang nonpri berkembang lebih besar lagi. Banyak diantara mereka menjadi konglomerat. Kesenjangan makin tegas. Di dunia perbankan misalnya 70 persen dana perbankan nasional berputar diantara para konglomerat yang jumlahnya hanya ratusan orang, sementara 30 persen berputar di kalangan pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya tentu lebih besar.

Rakyat kemudian makin tak senang karena banyak konglomerat melakukan praktik kolusi dan perilaku bisnis menyimpang lainnya – lewat aliansinya dengan pejabat, keluarga pejabat, khususnya puteri-puteri mantan presiden Soeharto, serta pusat-pusat kekuasaan lainnya. Praktik tersebut kasat mata dan tidak mampu dijangkau hukum dalam konfidurasi rezim yang otoriter korporatis dan birokratis dengan berbagai pola *patron clientnya*. Para *crony capitalist* dan *client capitalist* tumbuh subur dalam rezim demikian.

Nonpri kemudian identik dengan kekuasaan yang serakah dan menyengsarakan rakyat. Karena itu – dalam persepsi banyak orang – ia harus dirobohkan bersama sama denan kekuasaan yang korup, menekan, dan tak demokratis itu. Situasi semakin buruk karena adanya kesenjangan ekonomi luar biasa antara kelompok yang berpunya dan yang tak berpunya. Maka kebencian yang sudah terpendam lama seolah-olah memperoleh bahan bakarnya untuk tersulut menjadi kobaran api. Itulah salah satu hakikat peristiwa kerusuhan 14 Mei 1998.

Fenomena kebencian masyarakat lapis bawah terhadap etnis Tionghoa akhir-akhir ini terjadi antara lain akibat gagalnya proses gentrifikasi (priyayinisasi) etnis Tionghoa ke masyarakat. Usaha menghalang-halangi etnis Tionghoa menjadi priyayi dilakukan oleh politik pemerintahan Orde Baru pada tahun 1960-an, yang agaknya diwarisi oleh politik yang sama yang dilakukan pemerintah colonial Belanda.

Politik pemerintah awal Orde Baru yang menghapus sekolah-sekolah khusus anak-anak Tionghoa tahun 1960-an meski dimaksudkan untuk mendorong pembaruan, sesungguhnya justru berdampak pada hambatan priyayinisasi itu. Priyayinisasi atau masuknya etnis Tionghoa ke profesi-profesi lain secara luas dalam masyarakat menjadi penting karena kegagalan proses priyayinisasi itulah yang mengakibatkan konsentrasi masyarakat etnis Tionghoa ke dalam satu sector perdagangan saja. Masalahnya, penumpukan ini mengakibatkan timbulnya monopoli sector-sektor ekonomi dan berakibat kolusi dengan penguasa untuk mempertahankan dominasi ekonomi itu.

Hambatan terhadap proses priyayinisasi itu membuat warga Tiongha gagal menyebarkan perannya dalam masyarakat. Mereka tak bisa masuk pegawai negeri, tak bisa jadi tentara atau polisi, sehingga tak ada pilihan lain kecuali berdagang. Sadar akan posisinya yang rawan, mereka berdagang dengan disiplin tinggi dan membangun hubungan kerja sama dagang yang sangat kukuh.

Setelah lebih dari 50 tahun merdeka, kita sepatutnya bertanya apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan akibat dari kebijaksanaan *divide et impera* itu dalam bidang ekonomi umumnya dan perdagangan khususnya. Dengan lain perkataan: masalah pertentangan antar etnis bukanlah masalah etnis pada dasarnya, tetapi masalah integrasi politik dan ekonomi atau sebaliknya, masalah diskriminasi politik dan ekonomi.

Sudah jelas bahwa keunggulan kelompok timur asing dalam bidang perdagangan berkat pengalaman mereka dalam sector tersebut, dapat dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan ekonomi dari mereka tanpa terlalu banyak bersusah payah sendiri dengan melibatkan diri dalam pekerjaan dagang, yang menurut pandangan feodal bukanlah pekerjaan yang cukup mulia. Praktek "Ali-Baba" dalam Orde Lama, dan praktek penguasa-penguasa dalam Orde Baru, adalah contoh yang tak dapat dipungkiri apa pun penjelasannya.

Demikian pun dalam struktur sosial

feodal, pedagang tidak mempunyai status yang jelas, karena dalam struktur tersebut mereka tidak termasuk dalam kelompok priyayi dan tidak juga dalam kelompok *wong cilik* (istilah priyayi dan wong cilik digunakan di sini secara umum untuk menerjemahkan konsep *gentry* dan *peasantry* dalam antroplogi-sosial, jadi tidak dimaksudkan secara khusus seperti dalam masyarakat Jawa). Sebagai priyayi, mereka diangap terlalu "kasar", sedangkan sebagai *wong cilik* mereka dianggap terlalu "kaya".

Dalam bahasa Melayu lama, kata sedang berarti musafir, orang yang bepergian dan berkelana yang dalam konteks pembicaraan ini berarti orang yang tidak mempunyai *home* atau "rumah" dalam sosial yang ada (kuketahui tekukur sulang-menyulang/ Murai berkicau melagukan cinta/tetapi engkau aduhai dagang/umpama pungguk merayukan purnama, begitu tulis penyair Amir Hamzah dalam sajaknya Senyum Hatiku, Senyum). Struktur sosial feodal tidak memberi tempat kepada pedagang, dan dalam berbagai kebudayaan feodal pedagang selalu merupakan *the trading minority* (minoritas pedagang).

PENUTUP

System *apartheid* ala kolonial Belanda dalam kehidupan sosial, bisnis (usaha), dan politik ini bertahan sampai 1942. Yakni, saat runtuhnya Hindia Belanda. Sejak itu, sebagai buah diskriminasi selama berabad-abad ini kekerasan terhadap orang Cina adalah berita yang sering muncul ke permukaan.

Kekerasan massa secara besar terhadap orang Cina terjadi pada bulan Maret 1942 ketika Jepang mendarat dan Belanda menyerah. Di kota-kota pantai utara Jawa, rumah-rumah dan toko-toko Cina dijarahi. Sejak itu sejarah Indonesia penuh kekerasan (vuikebce), namun peristiwa-peristiwa kekerasan ini tidak selalu ditujukan pada Cina. Kadang ditujukan pada orang Ambon dan Belanda, pada komunis dan sebagainya, namun ada juga terhadap Cina.

Selama Orde Baru, isu masalah Cina ini tetap tidak terpecahkan. Bahkan, perkembangan kapitalisme dan modernisasi usaha makin menambah kesenjangan sosial dan ekonomi antara kaya dan miskin. Birokrasi dan militer yang menerima gaji rendah akhirnya berkolusi dengan pedagang Cina atau "menyandera" hak mereka yang pantas, seperti izin usaha. Pemerintah juga menjalankan kebijakan yang melarang semua ekspresi kebudayaan Cina kecuali dalam hal film Cina. Pemerintah juga mengisolasi kelompok Cina dari masyrakat luas sebagai "asing".

Lambang dari "apartheid" baru ini adalah makin meluasnya Islamisasi mendalam ini di kalangan masyarakat luas yang hampir tidak menyetujui golongan Cina. Sebagai golongan menengah dan usahawan yang kretif, orang Cina sangat individualis dan hanya akan membaur secara pribadi tidak sebagai suatu golongan.

Dengan sendirinya, bila kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diteruskan akan timbul konflik-konflik rasial yang seperti kita melihat akhir-akhir ini terjadi di Jakarta dan berbagai kota. Jangan lupa, kekerasan, dan aksi sepihak merupakan unsur yang bisa menjatuhkan pemerintah manapun dan bisa bersifat revolusioner.

Maka, pamecahan masalah minoritas ini harus ditujukan pada runtuhnya *apartheid* masyarakat. Istilah-istilah keturunan dan sebagainya harus hilang. Yang penting juga dipikirkan adalah gantinya konsep kewarganegaraan menjadi ius-soli. Yakni kewarganegaraan diberikan atas dasar tempat kelahiran, bukan keturunan darah atau azas ius-sanguinis yang berlaku seperti sekarang ini.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multi etnik, multi suku, multi cultural, multi agama. Konsep Indonesia adalah khusus konsep politik, bukan budaya atau lain-lainnya. Nasib Indonesia pada hari-hari mendatang akan tergantung dari pemecahan masalah ini dan pemberian kondisi ketentraman pada golongan minoritas apapun juga dan terhapusnya konsep minoritas (Ong Hok Ham, 1998: 25).

Saatnya kini pemerintah bersama para pakar yang terkait untuk merumuskan pembauran itu sendiri. Hal ini untuk menghindari kekhawatiran atau keragu-raguan sikap, terutama dengan munculnya "cap=cap" baru bagi pelaku pembauran, seperti: tidak nasionalis dan lain sebagainya. Munculnya "cap" baru tersebut seringkali menjadi suatu perangkap yang tidak disadari justru menimbulkan sikap apatis, takut menyalahi, ragu-ragu sehingga pada saatnya malah akan melemahkan motivasi pembauran yang alamiah, dan ini akhirnya dapat mendorong sikap eksklusivisme. Lalu bentuk pembauran atau kepedulian yang terekspresi adalah bantuan keuangan atau sumbangan materi lainnya. Jadi secara fisik dan budaya.

Pembauran harus dikondisikan dan diatur secara jelas oleh pemerintah dengan *political will*, pendidikan kebudayaan nasional yang terarah serta pelaksanaan hukum yang ketat dan adil, tanpa harus mengebiri hak-hak budayanya.

Integrasi secara politik akan tercipta misalnya, kalau kelompok Tionghoa diberi kesempatan yang sama untuk berkiprah dalam bidang politik dan bukannya dikucilkan dari bidang politik. Integrasi ekonomi akan akan tercipta kalau kelompok-kelompok pribumi juga mendapat kesempatan usaha yang sama dan mendapat bantuan yang diperlukan untuk mengimbangi kurangnya pengalaman mereka dalam bidang perdagangan yang diakibatkan antara lain oleh politik colonial.

Usaha tersebut jelas mempersyaratkan beberapa hal. Pertama, dihapusnya berbagai peraturan yang hanya menguntungkan kelompok kuat, dan diciptakan peraturan yang lebih memberi mereka tanggung ajwab terhadap Negara dan masyarakat, misalnya melalui peraturan perpajakan. Kedua, dituntut kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memecahkan masalah ini dengan membicarakannya secara terbuka untuk mendapatkan penyelesaian